



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI BANTEN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012-2013**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2013**



**L A P O R A N**  
**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR-RI**  
**KE PROVINSI BANTEN**  
**RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012-2013**  
**TANGGAL 14 S.D. 18 APRIL 2013**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib.
2. Rapat Konsultasi **Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-Fraksi tanggal 22 Oktober 2012.**
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 8 Januari 2013.
4. Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI tanggal 1 April 2013.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan kunjungan lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya serta *stake holder* terkait dengan realisasi dan pelaksanaan pembangunan sektor bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Banten, serta dukungan dan sinkronisasinya dengan program - program pembangunan Pemerintah Daerah.
2. Berdialog langsung dengan masyarakat dan melihat langsung di lapangan realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Banten.
3. Mendapatkan informasi langsung tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek legislasi (peraturan perundang-undangan), anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah bidang Komisi IV DPR RI dan alternatif pemecahan masalahnya.
4. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang Komisi IV DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

### C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA ANGGOTA                    | FRAKSI             |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1  | Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si     | KETUA TIM/F-PD     |
| 2  | HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE,MM | ANGGOTA/F-PD       |
| 3  | ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.IP.    | ANGGOTA/F-PD       |
| 4  | MAIMARA TANDO                   | ANGGOTA/F-PD       |
| 5  | HJ. TETTY KADI BAWONO           | ANGGOTA/F-PG       |
| 6  | ROBERT JOPPY KARDINAL           | ANGGOTA/F-PG       |
| 7  | DRS. I MADE URIP, M.Si          | ANGGOTA/F-PDIP     |
| 8  | HONING SANNY                    | ANGGOTA/F-PDIP     |
| 9  | IR. Hb. NABIEL AL MUSAWWA, M.Si | ANGGOTA/F-PKS      |
| 10 | H. SUKIMAN, SPd, MM             | ANGGOTA/F-PAN      |
| 11 | HJ. MIRATY DEWANINGSIH T., ST.  | ANGGOTA/F-PKB      |
| 12 | ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA     | ANGGOTA/F-GERINDRA |

### D. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Banten dilaksanakan pada hari Minggu - Kamis, Tanggal 14 - 18 April 2013.

### E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN

Acara dan lokasi yang dikunjungi dalam kunjungan kerja Tim Anggota Komisi IV DPR RI di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan ke Lokasi Penanaman Pohon di Badan Diklat Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang;
2. Kunjungan ke Lokasi Penerima Program Pengembangan Jaringan Irigasi di Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
3. Peninjauan Kapal Penangkapan Ikan INKA MINA di Labuan, Kabupaten Pandeglang;

4. Kunjungan ke Kelompok Penangkar Benih Kedelai Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang;
5. Pertemuan dengan PT Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. PUSRI dan PERUM BULOG di Hotel Kharisma Beach and Resort, Labuan – Kabupaten Pandeglang;
6. Peninjauan Gudang Pupuk Sriwijaya di Kota Serang;
7. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya;
8. Kunjungan ke Lokasi Penerima Program Revitalisasi Tambak Udang di Kampung Kemayungan, Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
9. Kunjungan ke Bagian Karantina Pertanian dan Perikanan dan Instalasi Pemusnahan Karantina di Bandara Soekarno Hatta, Kabupaten Tangerang.

## F. GAMBARAN UMUM

**1. Kunjungan ke Lokasi Penanaman Pohon di Badan Diklat Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang.** Komisi IV DPR RI diterima oleh Staf ahli gubernur bidang pembangunan, menggantikan gubernur Banten. Beberapa hal yang disampaikan adalah:

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten adalah 208.161,27 Ha, atau 24,06 % dari total luas wilayah Provinsi 865.120 Ha. Kawasan hutan yang dimaksud meliputi:

- Hutan Lindung 9.471,39 Ha (4,55 %); dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten dan KPH Bogor.
- Hutan Produksi 70.797,58 Ha (34,01%); dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten dan Puslitbanghut KR.
- Hutan Konservasi (Daratan) 127.892,3 Ha (61,44 %); yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Halimun Salak, BBKSDA Jabar dan Pemprov Banten dalam bentuk Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
- Kawasan Konservasi (Perairan) TN Ujung Kulon 44.337 Ha dan Pulau Sangiang 720 Ha

Luas pengusahaan oleh Perum Perhutani KPH Banten adalah 77.145,60 Ha, meliputi bidang usaha kayu Kelas Jati, Kelas Acacia dan Kelas Mahoni. Kegiatan lain yang dilakukan adalah (1) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang mempunyai 204 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan nilai sharing kayu mencapai Rp. 583.236.134, (2) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), (3) Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis

Korporasi (GP3K) yang berhasil memproduksi pangan mencapai 10.086,35 ton, serta (4) Program BUMN Membangun Desa. Sementara itu Luas perusahaan oleh Perum Perhutani KPH Bogor adalah 1591,85 Ha melalui kegiatan Mina Wana.

Sementara itu luas lahan kritis di Provinsi Banten mencapai 104.103 Ha, dimana sekitar sepertiganya berada di kabupaten Pandeglang (33.379 Ha). Oleh karena itu Provinsi Banten melakukan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan target 13,5 juta batang tiap tahun. Sejak tahun 2010 realisasi penanaman pohon melampaui target berturut-turut sebesar 13,8 juta, 15,3 juta dan 19,6 juta batang pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Kawasan Hutan adalah masalah tukar menukar kawasan hutan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dilaporkan bahwa terdapat sertifikasi pada kawasan hutan yang di pinjam pakai seluas ± 2.500 m<sup>2</sup> yang terletak di areal Perum Perhutani BKPH Serang KPH Banten. Selain itu Lahan pengganti untuk proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) seluas 2.929, 86 Ha di areal Perum Perhutani BKPH Cikeusik KPH Banten, masih belum bisa di manfaatkan oleh pengelola karena masih dikuasai masyarakat. Sedangkan masalah yang dihadapi terkait dengan gangguan keamanan antara lain adalah Penambangan Liar (emas) di kawasan hutan lindung, Okupansi lahan pertanian, pemukiman di kawasan hutan, dan pencurian hasil hutan (kayu dan TSL).

## **2. Kunjungan ke Lokasi Penerima Program Pengembangan Jaringan Irigasi di Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.**

Kunjungan ke pengembangan jaringan irigasi dilakukan di Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Kelompok Tani “Endah” yang ada di desa ini mendapat bantuan pengembangan jaringan irigasi desa dari Kementerian Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp. 30 juta yang digunakan untuk membangun saluran irigasi sepanjang 100 meter. Selain dari bantuan pusat, dana pembuatan irigasi juga melibatkan swadaya petani setempat.

Saluran Irigasi yang telah dibangun memberikan dampak positif bagi pertanian setempat. Dari saluran sepanjang 100 meter yang telah dibuat, dapat mengairi sawah hingga 100 hektare. Selain itu petani yang selama ini hanya panen 2 kali setahun kini bertambah hingga 3 kali panen dalam setahun. Produktivitas juga meningkat dari 4,3 ton per hektare menjadi 6,2 ton per hektare. Petani setempat menargetkan Produktivitas dapat digenjut hingga 7,5 ton per hektare.

Jenis padi yang dibudidayakan di daerah adalah jenis Ciherang. Petani juga sudah mendapatkan SRI sebanyak 8 ton. Menurut petani, kesediaan pupuk

relatif lancar. Pupuk urea bersubsidi didapatkan dengan harga Rp.1.800 /kg. Namun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan ALSINTAN untuk pengolahan lahan. Kelompok Tani Desa Cimanuk berharap pemerintah dapat memberikan bantuan Alsintan kepada kelompok tani di desa tersebut. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar mengalokasikan bantuan ALSINTAN pada Tahun Anggaran 2013.

### **3. Peninjauan Kapal Penangkapan Ikan INKA MINA di Tempat Pendaratan Ikan Labuan, Kabupaten Pandeglang.**

Komisi IV DPR RI meninjau 2 unit bantuan kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu bantuan kapal 30 GT yang diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan kapal bantuan 44 GT yang diberikan melalui pemerintah Provinsi Banten. Kedua kapal tersebut akan diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang berada di Labuan - Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menyampaikan bahwa kedua kapal berbahan kayu tersebut dibangun di Pandeglang. Kapal INKA MINA 367 berkapasitas 30 GT yang diberikan ke KUB Nelayan di Kabupaten Pandeglang menelan anggaran Rp.1,5 miliar yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012. Selain untuk pembangunan kapal, anggaran tersebut sudah termasuk untuk pembelian alat tangkap dan mesin kapal. Sementara itu untuk kapal yang dialokasikan untuk Provinsi Banten berkapasitas 44 GT. Pada waktu kunjungan, kapal ini berada terlalu jauh dari tepi sehingga anggota Komisi IV tidak dapat meninjau kondisi dan isi kapal. Pada saat peninjauan, Kedua kapal tersebut masih dalam kondisi baru dan belum dioperasikan.

Komisi IV memandang bahwa kapal bantuan untuk nelayan seharusnya bisa dioperasikan pada awal tahun 2013, sebab bantuan kapal untuk nelayan itu telah diberikan sejak tahun 2012. Namun pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum melakukan serah terima dengan kelompok nelayan penerima bantuan sebab kapal masih belum dilengkapi dengan perizinan meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), surat pas ukur kapal, Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat Pemberangkatan Berlayar (SPB). Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa mereka tidak akan melakukan serah terima bantuan kapal kepada Kelompok Nelayan karena belum keluarnya surat-surat yang diperlukan agar kapal dapat beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk saat ini Pihak Pemda Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang sedang menunggu izin-izin tersebut yang saat ini masih diproses di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.

Komisi IV DPR RI meminta kepada Ditjen Perikanan Tangkap KKP untuk segera menerbitkan perizinan kapal-kapal bantuan INKA MINA yang telah siap agar dapat segera dimanfaatkan untuk menangkap ikan oleh masyarakat. Selain itu Komisi IV meminta kepada Gubernur Banten agar mengirimkan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat segera menerbitkan dokumen perizinan terhadap kapal INKA MINA di Provinsi Banten.

#### **4. Kunjungan ke Kelompok Penangkar Benih Kedelai Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang**

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Banten menerima program pengembangan tanaman kedelai seluas 15.500 hektare yang terdiri atas Lahan Model seluas 10.000 hektare, SLPTT 5.000 hektare, dan perluasan areal baru seluas 500 hektare. Untuk memenuhi luasan tersebut diperlukan 620 ton benih kedelai. Anggaran khusus pengembangan kedelai dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Banten adalah Rp.11 miliar, namun program ini kurang didukung oleh Pemprov Banten yang mengalokasikan hanya Rp.1 miliar dan Pemkab Pandeglang Rp.10-12 juta.

Petani setempat menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi sebagai berikut:

1. Sulitnya mendapatkan benih sumber. Dari kebutuhan 620 ton, yang dapat disuplai sendiri hanya 140 ton yang berasal dari penangkar 26 ton, dari PT. Pertani 60 ton, dan dari Jawa Tengah 54 ton. Sulitnya mendapatkan benih sumber disebabkan karena pengembangan benih kedelai tidak sedinamis pengembangan benih padi.
2. Terlambatnya suplai benih. Karakteristik pertanian di daerah tersebut adalah pertanian musiman, dimana petani menanam padi huma pada musim hujan dan kedelai pada musim kering. Idealnya benih kedelai sudah siap satu minggu sebelum panen padi huma, namun hingga saat ini benih kedelai belum tersedia. Menurut Petani setempat, PT. Sang Hyang Seri (SHS) menjanjikan benih akan turun bulan juni, padahal idealnya bulan April hingga Mei ini benih harus tersedia.
3. Petani mengeluhkan mengenai persyaratan "Label Biru" untuk benih yang digunakan untuk program. Jika benih yang digunakan harus berlabel biru, maka suplai benih akan sangat tergantung pada BUMN penyuplai benih. Petani tidak berani menanam dengan benih buatan sendiri karena takut tidak sesuai ketentuan. Dengan menggunakan benih sendiri, produktivitas kedelai saat ini hanya 800-900 kg/ha, jika menggunakan benih label biru,

produktivitas mencapai 1,1 – 1,4 ton/ha dan dapat digenjut hingga maksimal 1,6-1,8 juta ton/ha.

4. Sehubungan dengan iklim yang tidak menentu dan keinginan untuk meningkatkan produktivitas, Petani setempat menyampaikan aspirasi agar pemerintah dapat membantu menyediakan ALSINTAN berupa mesin perontok dan pengering kedelai.

Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Maman Suherman, menyampaikan bahwa Ditjen tanaman Pangan menargetkan PT SHS untuk mengembangkan kedelai seluas 1 juta hektare dengan membiayai sekitar 600 ribu hektare. Untuk memenuhi kebutuhan benih sumber, Kementan menugaskan kepada 2 BUMN (PT. SHS dan PT Pertani) untuk memproduksi benih 15.000 ton dari kebutuhan total 40.000 ton/tahun. Kekurangannya (25.000 ton) akan dilakukan melalui perbanyakan ganda yang dilakukan oleh para petani penangkar benih. Mengenai masalah label biu yang dipermasalahkan petani, Kementan telah mengeluarkan Peraturan Dirjen yang memperbolehkan petani untuk menggunakan benih lokal bermutu, sehingga petani dapat menggunakan benih yang diproduksinya sepanjang diproduksi dari turunan benih unggul.

PT. Pertani menyampaikan bahwa permasalahan terlambatnya benih kedelai terkait dengan masih belum turunnya anggaran PSO kedelai dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertanian. Namun saat ini mereka telah menyiapkan 60.000 ton benih yang didatangkan dari Aceh dan Grobogan Jawa Tengah untuk mensuplai kebutuhan benih sumber, termasuk untuk petani di Kabupaten Pandeglang ini. Mereka menjanjikan akan mendatangkan benih dalam 2 minggu ini.

Komisi IV DPR RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kendala teknis terkait belum turunnya anggaran PSO sudah diselesaikan dan ditargetkan paling lambat 2 minggu ini anggaran sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan.
2. Meminta kepada PT SHS dan PT. Pertani agar segera menyalurkan benih kedelai kepada petani agar kedelai dapat ditanam tepat waktu.
3. Perlu dilakukan perencanaan ulang pola tanam dengan realisasi anggaran. Seyogyanya realisasi anggaran harus menyesuaikan dengan pola tanam dan tidak sebaliknya.
4. Meminta kepada Pemerintah agar membuat prediksi penambahan kapasitas tanam dengan memanfaatkan lahan-lahan Perhutani untuk menggenjut target produksi kedelai.
5. Memandang perlunya Buffer Stock yang berfungsi untuk melakukan jaminan serapan pasar dan pengendalian harga, terutama komoditas kedelai, pada saat panen raya.



6. Meminta kepada Kementan untuk mengalokasikan ALSINTAN berupa mesin perontok dan pengering untuk membantu petani kedelai di Kabupaten Pandeglang.
7. Mengusulkan perlunya pencaangan Provinsi Banten sebagai Sentra Kedelai Nasional untuk mendorong produksi kedelai di Provinsi Banten.

**5. Pertemuan dengan PT Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. PUSRI dan PERUM BULOG di Hotel Kharisma Beach and Resort, Labuan – Kabupaten Pandeglang.**

***Pemaparan dari PT Sang Hyang Seri (Persero)***, beberapa hal yang disampaikan antara lain:

- a. Realisasi Penyaluran BLBU di Provinsi Banten pada Tahun 2012 (Paket II) mencapai 100% dengan volume penyaluran untuk Padi Inhibrida (varietas unggul lokal) adalah 3.671.250 kg, Padi Lahan Kering 625.000 kg, Jagung Hibrida 6.750 kg dan Kedelai 206.000 kg. pada tahun ini PT SHS tidak menyalurkan jenis padi hibrida.
- b. Pada Tahun 2012, PT SHS ditugaskan untuk menyalurkan 2 jenis benih untuk program Cadangan Benih Nasional (CBN) di Provinsi Banten dengan volume total 1.186.375 kg, terdiri dari Padi Inhibrida (varietas unggul lokal) sebesar 1.444.375 kg dan Kedelai sebanyak 42.000 kg. Sementara itu untuk tahun 2011 jenis yang disalurkan adalah Padi Inhibrida, Padi Gogo dan Jagung Hibrida dengan volume total 1.336.165 kg.
- c. Realisasi Penyaluran Subsidi Benih di Banten pada tahun 2010 sebesar 993.090 kg, tahun 2011 sebesar 1.369.750 kg dan tahun 2012 sebesar 364.475 kg. Khusus tahun 2011 dan 2012 benih yang disalurkan hanya dari jenis Padi Inhibrida (varietas unggul lokal).
- d. Pada tahun 2013, rencana alokasi subsidi benih total (nasional) adalah 91.200 ton untuk menyuplai areal 3.753.000 ha. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Provinsi Banten adalah 2.665 ton yang akan digunakan untuk menyuplai 104.700 ha.
- e. Sampai dengan bulan April 2013 belum ada realisasi penyaluran benih bersubsidi karena belum ada payung hukumnya. Oleh karena itu PT SHS menyampaikan permohonan agar:
  - Diterbitkan Pedum dan Juknis Pelaksanaan Subsidi Benih tahun 2013,
  - Ditetapkan alokasi provinsi dan kabupaten/kota penerima Subsidi Benih tahun 2013,

- Diterbitkan CPCL oleh Kementan beserta aparat Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/Kota, serta memastikan bahwa petani yang termasuk dalam CPCL sebagai pembeli benih subsidi tahun 2013,
- Dibuat alokasi dan pembagian daerah penyaluran subsidi benih tahun 2013 antara PT SHS dan PT Pertani dalam PEDUM & JUKNIS,
- Dipercepat DIPA dan Peraturan Menteri Keuangan

**Pemaparan dari PT Pertani (Persero)**, beberapa hal yang disampaikan antara lain:

- a. Pada tahun 2013 PT Pertani mendapat tugas untuk penyediaan pupuk bersubsidi untuk jenis Procal dengan volume 17.127.273 kg dengan harga satuan Rp.9000,-/kg senilai Rp.154.145.000.000,-, dan Rizhobium dengan volume 34.255 kg dengan harga Rp.1.000.000,-/kg senilai Rp.34.255.000.000,-, sehingga total PSO yang dialokasikan adalah Rp.188,4 miliar. Alokasi pupuk bersubsidi TA 2013 di Provinsi Banten melalui PT Pertani adalah sebesar 22.747 ton, berupa Urea (ex PUSRI) 10.360 ton, SP-36 6.150 ton, Phonska 4,760 ton dan Petroganik 1.162 ton.
- b. Rancangan Penyediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) Tahun 2013 oleh PT Pertani adalah 10.400 ton senilai Rp.115,98 miliar. Jenis bantuan benih yang akan disalurkan meliputi Padi Inhibrida (varietas unggul lokal), Padi Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, Kedelai, Kacang tanah dan kacang hijau. Realisasi CBN di Provinsi Banten sampai saat ini sebanyak 167,78 ton dengan nilai Rp.1.141,77 juta.
- c. Untuk penyiapan sarana dan prasarana pertanian, PT Pertani telah menyiapkan produksi benih padi, jagung dan kedelai untuk mendukung program subsidi benih, CBN dan Freemarket tahun 2013 sebanyak 68.579 ton. PT Pertani juga ditunjuk sebagai distributor pupuk subsidi oleh PT. Pupuk Holding sebesar 89.677 ton dan produksi pupuk sendiri (Procal 10.000 ton, POG 12.000 ton, NPK 6.500 ton, POC 130.000 liter, Booster Urea, Insektisida, Herbisida, Fungisida dll.)
- d. Untuk mendukung program pengamanan pasca panen dan peningkatan nilai produksi padi, maka PT Pertani merencanakan pemasangan dryer sebanyak 219 unit di sentra produksi beras. Dalam tahun 2013 telah dipersiapkan pemasangan untuk 120 dryer dan sisanya 99 unit pada tahun 2014, serta program penyimpanan hasil panen/gabah dengan sistem Resi Gudang. Saat ini di Provinsi Banten telah dilakukan pemasangan 2 unit Dryer yang berada di Gudang Warung Gunung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan Gudang Karolina Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
- e. Total rencana penyediaan benih bersubsidi tahun 2013 untuk Padi Inhibrida (varietas unggul lokal) sebanyak 52.509 ton, Padi Hibrida 3.000 ton, Jagung Hibrida 4.270 ton, Jagung Komposit 800 ton dan Kedelai 8.000 ton. Kapasitas produksi di 24 UPB Padi adalah 60.000 ton/tahun, sementara di 1 UPB jagung 5.000 ton/tahun dan pada 1 UPB sawit 100.000 bibit. Untuk saat ini belum ada realisasi penyaluran benih bersubsidi di Provinsi Banten.

- f. Rencana GP3K tahun 2013 oleh PT Pertani di Provinsi Banten akan dilakukan di 18 Kecamatan dari 4 Kabupaten dengan luasan total 41.250 hektare. Untuk program GP3K keseluruhan target luas lahan sasaran program adalah 1 juta hektar. Realisasi GP3K nasional PT Pertani per 31 Maret 2013 telah mencapai luas tanam 348.000 ha dengan luas panen 275.000 ha. Sementara itu rencana 2013 untuk Provinsi Banten telah dilakukan oleh 1.650 kelompok tani dengan luas lahan 41.250 ha.
- g. Kendala umum yang dihadapi PT Pertani adalah masalah besarnya modal yang diperlukan untuk memaksimalkan penampungan hasil panen pada areal kemitraan GP3K. selain itu kurangnya sosialisasi dan adanya pengaruh bantuan langsung sebelumnya menyebabkan petani belum semuanya memahami maksud dan tujuan program GP3K sehingga menimbulkan potensi adanya piutang yang macet.
- h. Aspirasi yang disampaikan oleh PT Pertani adalah permohonan dukungan untuk:
  - Peremajaan dan modernisasi Unit Prosesing Benih (UPB) dan unit Penggilingan Padi (UPP),
  - Perbaikan gudang untuk menampung hasil pertanian termasuk dalam pola resi gudang,
  - Alokasi dana Program Kemitraan (PK) yang lebih besar untuk program GP3K dan program kemitraan yang lain,
  - Meningkatkan fungsi PT Pertani sebagai BUMN dalam distribusi pupuk subsidi,
  - Rancangan pemberian subsidi pascapanen (angkutan, pengeringan, dan resi gudang) serta asuransi bagi petani.

***Pemaparan dari PT PUSRI***, beberapa hal yang disampaikan antara lain:

PT Pusri menyalurkan Pupuk Urea di Kabupaten Banten untuk mencakup 376.692 ha lahan pertanian, dimana cakupan terluas sekitar 108.000 ha (28,67%) berada di Kabupaten Pandeglang. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2010 adalah 52%, tahun 2011 terealisasi 87.800 ton (60%), tahun 2012 terealisasi 73.600 ton (90%), sementara rencana realisasi untuk tahun 2013 sebesar 60.500 ton. Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, PT PUSRI dibantu oleh 24 Distributor Pendukung dan 547 kios pengecer.

Kapasitas gudang yang dimiliki oleh PT Pusri Banten saat ini adalah 16.000 ton. Stok yang ada saat ini besar 13.295 ton. Permasalahan PT Pusri yang disampaikan pada Komisi IV pada saat kunjungan adalah Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2012 akibat terlambatnya pengeluaran keputusan Bupati/Walikota mengenai RDKK dan masih banyak kelompok petani yang belum tercover pada RDKK dalam SK Bupati.

***Pemaparan dari PERUM BULOG***, beberapa hal yang disampaikan antara lain:

Posisi stok Beras terakhir secara nasional dilaporkan sebesar 2,2 juta ton. Jumlah ini cukup untuk menyangga ketahanan pangan hingga 8-9 bulan. Saat ini sedang dilakukan pengadaan beras sebanyak 780.000 ton.

Kendala yang disampaikan adalah alokasi dana pendampingan belum dialokasikan oleh daerah. Selain itu alokasi pembagian Raskin di Banten masih menganut sistem bagi rata. Disampaikan juga bahwa terdapat tunggakan Raskin Provinsi Banten sebesar Rp.260 juta.

## **6. Peninjauan Gudang Pupuk Sriwijaya di Kota Serang**

Pupuk urea Provinsi Banten hanya disuplai oleh PT PUSRI, untuk jenis pupuk lainnya ada yang disuplai dari Petrokimia Gresik. Masalah yang disampaikan adalah:

- a. Masih banyak petani yang belum bergabung kedalam kelompok-kelompok tani, sehingga mereka tidak masuk dalam RDKK.
- b. Realisasi serapan pupuk Provinsi Banten selama lima tahun terakhir selalu lebih dari 60.000 ton/tahun, namun alokasi yang disetujui pusat hanya 60.000 ton. Guna memenuhi kebutuhan petani, Pemprov menyampaikan aspirasi agar alokasi pupuk Provinsi Banten ditambah pada kisaran 66.000 – 70.000 ton per tahun.
- c. Terlambatnya diterbitkannya Surat Keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur dalam menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK di wilayahnya, yang menyebabkan terlambatnya pasokan pupuk kepada petani.

## **7. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:**

Provinsi Banten resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000. Luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km<sup>2</sup> terdiri dari 4 kabupaten (Tangerang, Serang, Lebak Pandeglang) dan 4 kota (Tangerang, Serang, Cilegon, Tangerang Selatan) dengan jumlah 154 kecamatan dan 1504 desa/kelurahan. Posisi Provinsi Banten cukup strategis karena Banten merupakan:

- Daerah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera
- Dilalui jalur lalu lintas Internasional (Selat Sunda)
- Daerah Rawan Bencana (gempa tektonik dari Samudera Hindia dan gempa vulkanik Krakatau)

Jumlah penduduk Provinsi Banten hingga tahun 2006 sebesar 9.308.944 Jiwa. Sekitar 60% dari jumlah penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Luas Lahan pertanian di Propinsi Banten sampai dengan tahun 2008 adalah seluas 861.856 Ha terdiri dari 195.176 Ha lahan Sawah dan 666.680 Ha Lahan kering dan Luas Lahan sawah menurut jenis pengairannya terdiri dari 52.102 Ha irigasi teknis, 18.417 ha irigasi setengah teknis, 21.630 Ha irigasi sederhana, 24.458 Ha irigasi desa dan 78.569 Ha adalah tadah hujan.

Pada tahun 2011, Provinsi Banten Surplus beras sebanyak 87.000 ton. Namun pada Tahun 2012 produksi mengalami penurunan produksi karena berbagai kendala seperti alih fungsi lahan yang cukup pesat dan gagal panen akibat kekeringan sepanjang tahun 2012. Alokasi APBD Tahun 2012 untuk mendukung sektor pertanian adalah 45,49 miliar. Pada tahun 2013 Provinsi banten mendapat alikasi SL-PTT Padi seluas 181.800 ha dengan kebutuhan benih bersubsidi sebesar 4.545 ton. Sementara itu kebutuhan SL-PTT Jagung sebesar 90 ton untuk luas 6.000 ha. Pada tahun 2012 Provinsi Banten menerima Bantuan PUAP sebanyak 139 Gapoktan dan LM3 sebanyak 7 unit.

Provinsi Banten juga telah mendapatkan berbagai program strategis baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan program-program dari kementerian kehutanan sehingga prestasi yang Banten capai, yaitu Banten telah masuk kedalam 10 besar provinsi yang dapat memberikan kontribusi peningkatan produksi tanaman pangan tingkat nasional. Pada tahun 2010, Banten mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui Kementrian Pertanian atas penilaian terhadap Banten yang dianggap telah meningkatkan produksi terkait dengan udang dan ikan bandeng.

Terkait dengan sektor Kehutanan, Gubernur menilai adanya dukungan sangat positif terhadap Banten untuk soal kehutanan. Banten telah melaksanakan apa yang menjadi amanat pemerintah pusat, dimana Presiden telah mencanangkan 1 miliar penanaman pohon pada tahun 2012. Gubernur juga menyampaikan masalah keamanan hutan lindung, terutama masalah penambangan emas liar oleh masyarakat di kawasan hutan lindung dan penataan kawasan TN GHS di Kabupaten Lebak – Banten.

Pada pertemuan ini Komisi IV DPR RI telah menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti keterlambatan pasokan benih kedelai, pengadaan kapal 30 GT yang belum beroperasi, keterlambatan penyaluran pupuk karena belum terbitnya SK Gubernur, Bupati dan Walikota tentang penetapan RDKK dan kebutuhan pupuk bersubsidi. Mengenai keterlambatan benih kedelai dan pupuk, Komisi IV telah mengkoordinasikan dengan BUMN PSO untuk mengatasi hal ini. Mengenai keterlambatan SK Bupati/walikota tentang penetapan RDKK, Gubernur telah memerintahkan kepada Sekda Provinsi untuk mengirim surat kepada Bupati dan Walikota agar segera menerbitkan SK tersebut. Sementara itu untuk Kapal penangkap ikan 30

GT yang belum beroperasi, Gubernur menjelaskan bahwa saat ini kapal sedang menunggu perizinan terbit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **8. Kunjungan ke Lokasi Penerima Program Revitalisasi Tambak Udang di Kampung Kemayungan, Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.**

Kampung Kemayungan, Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang ditunjuk oleh KKP sebagai lokasi percontohan revitalisasi udang (Demfarm) pada APBN Tahun Anggaran 2012. Areal ini awalnya merupakan lahan tambak yang sempat dikelola oleh sebuah perusahaan, namun terbengkalai karena ditinggal pemiliknya 15 tahun yang lalu. Ditjen Perikanan Budidaya KKP merevitalisasi lahan tersebut dengan menggerakkan masyarakat setempat untuk mengusahakan kembali tambak udang dengan menjalin kemitraan dengan JAPFA.

Budidaya tambak udang merupakan usaha padat karya yang mampu menyerap 30-40 tenaga kerja per hektar. Total lahan tambak yang direvitalisasi di Kabupaten Serang seluas 209 ha, menyerap anggaran Rp.33,18 miliar yang berasal dari alokasi APBN-P tahun 2012 sebesar Rp.225,6 miliar. Bantuan diberikan dalam bentuk Sarana Produksi (kincir, pompa), benur/benih, rehabilitasi lahan, fasilitasi listrik, rumah jaga, dan menutup kekurangan pakan. Pada musim panen saat ini total udang yang berhasil di panen di 5 kabupaten pecontohan mencapai 400 ton.

Menurut Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Subiyakto, Program Revitalisasi Budidaya Tambak Udang dengan pola kemitraan seperti ini memberi dampak positif bagi para petambak. Dengan dukungan mitra usaha dari korporasi, dunia perbankan mau lagi masuk untuk usaha tambak rakyat. Sebagai contoh di Kabupaten Subang saja, BTN menyatakan kesediaan untuk menggelontorkan kredit sebesar Rp.4,7 miliar, BRI menyiapkan Rp.4 miliar dan BNI 46 telah berkomitmen sebesar Rp.7 miliar untuk pembiayaan usaha tambak rakyat kemitraan. Diharapkan Indonesia dapat mencapai kembali kejayaan Udang sebagaimana terjadi pada era 80'an, terlebih saat ini produksi udang di berbagai negara produsen udang utama seperti China dan Vietnam mengalami penurunan.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya KKP terhadap program revitalisasi tambak budidaya karena hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberi kontribusi signifikan bagi devisa negara. Komisi IV DPR RI meminta kepada para petambak percontohan agar terus mengembangkan usaha tambak dan dapat program dapat diperluas ke daerah-daerah potensial

lainnya. Untuk itu Komisi IV akan terus berjuang agar program revitalisasi budidaya dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

## **9. Kunjungan ke Bagian Karantina Pertanian dan Perikanan dan Instalasi Pemusnahan Karantina di Bandara Soekarno Hatta, Kabupaten Tangerang.**

Komisi IV melakukan kunjungan ke Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta untuk melihat proses handling pemasukan barang dari luar negeri/impor yang memerlukan tindak pengecekan oleh karantina. Pada saat kunjungan, Badan Karantina sedang melakukan handling terhadap produk buah, bungan dan ikan. Kepala Stasiun Karantina Bandara Soekarno Hatta menunjukkan kondisi handling di terminal cargo, termasuk minimnya ruangan, sarana / prasarana dan SDM karantina yang dimiliki. jika dibandingkan dengan beban kerja. Dari jumlah pegawai sebanyak 130 orang, hanya sekitar 60% saja yang siaga di lapangan. Dukungan Komisi IV sangat diperlukan untuk dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Karantina Pertanian maupun Perikanan untuk dapat memberikan pelayanan optimal.

Kunjungan ke Lokasi Pemusnahan barang karantina dilakukan dengan acara pemusnahan barang-barang impor yang disita karena tidak lolos proses karantina. Pada kesempatan tersebut sebanyak 40 media pembawa yang dikenakan tindak pemusnahan.

## **G. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam upaya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan di provinsi Banten.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk
  - Memberikan dukungan untuk pengembangan irigasi yang ada di Provinsi Banten serta mengalokasikan Alsintan keada kelompok-kelompok tani, terutama di Kabupaten Pandeglang, yang telah berhasil melaksanakan pengembangan irigasi guna meningkatkan produktivitas padi di wilayahnya.
  - Mengalokasikan ALSINTAN berupa mesin perontok dan pengering untuk membantu petani kedelai di Kabupaten Pandeglang Melakukan evaluasi terhadap penjadwalan anggaran dan penyaluran bantuan benih disesuaikan dengan pola tanam, agar bantuan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat musim tanam.

- Melakukan evaluasi terhadap Juklak dan Juknis pelaksanaan program penangkaran benih kedelai, sehingga pada saat terjadi keterlambatan pasokan, masyarakat / pelaku usaha lokal dapat menggunakan benih kedelai unggul sendiri.
  - Memandang perlunya Buffer Stock yang berfungsi untuk melakukan jaminan serapan pasar dan pengendalian harga, terutama komoditas kedelai, pada saat panen raya.
  - Menambah alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten pada kisaran 66.000 – 70.000 ton pada tahun 2013.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan dokumen perizinan kapal INKA MINA 30 GT yang telah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Selain itu Komisi IV DPR RI juga meminta agar program revitalisasi tambak udang dapat diperluas di wilayah lainnya sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan masyarakat pesisir Banten.
  4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk membantu Permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten terkait kehutanan yaitu belum jelasnya masalah tata batas hutan serta masalah penanganan penambangan liar di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Lebak - Banten.

## H. PENUTUP

Terhadap beberapa aspirasi dari mitra kerja/pemerintah daerah dan tanggapan dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten akan tindaklanjuti dengan menyampaikan baik pada saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Beberapa program pembangunan yang diusulkan langsung dan atau tertulis oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah selama kunjungan kerja ini agar dapat ditindak lanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait khususnya dalam APBN Tahun 2013.

Jakarta, 26 April 2013

KOMISI IV DPR RI  
KETUA TIM,

**Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.**

A-483